

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

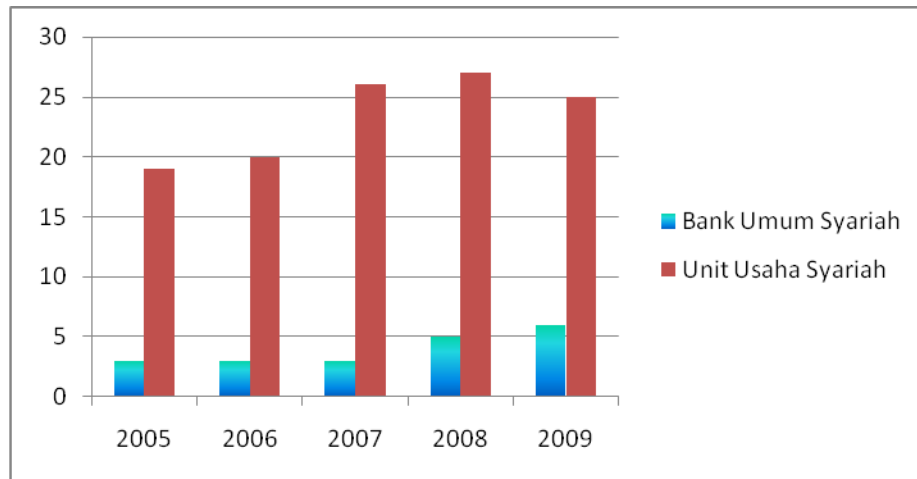
Perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi sektor riil dengan pemilik dana. Fungsi perbankan dalam kebijakan makro ekonomi diarahkan pada bagaimana uang dapat dengan efektif dan efisien meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian. Tidak diragukan lagi bahwa peranan sektor perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan terpuruknya seluruh sendi perekonomian Indonesia, salah satunya sektor perbankan, memunculkan suatu pertanyaan apakah sektor perbankan yang selama itu dijalankan di Indonesia dapat menjadi alat efektif dan efisien dalam mencapai target perekonomian? Ditengah-tengah krisis, muncullah perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Selama 10 tahun terakhir, perbankan syariah terbukti telah teruji kemampuannya dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Setelah dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, perbankan syariah telah berkembang dengan pesat, hal ini menggambarkan fenomena bank syariah yang bukan lagi sekedar sebuah wacana atau eksperimen belaka melainkan sudah tumbuh menjadi industri yang relatif subur dan menguntungkan. Tingkat

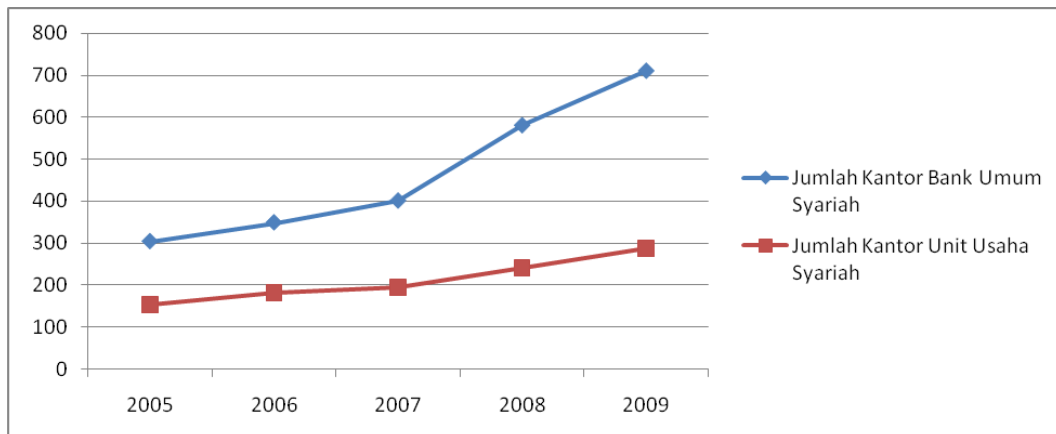
pertumbuhan yang tinggi dinikmati hampir semua lembaga keuangan syariah dalam satu dekade terakhir, terutama dipicu oleh bertambahnya bank-bank yang menawarkan jasa keuangan syariah paska Undang-undang. No.10 tahun 1998. Apalagi, sejak disahkannya Undang-undang tentang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, turut membuat kepastian hukum perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2009 (gambar 1.1 dan 1.2) telah terjadi pertumbuhan jumlah bank syariah sejak tahun 2005 sampai tahun 2009. Pada Desember 2005, terdaftar 22 bank syariah beserta 458 kantor cabangnya dengan rincian 3 Bank Umum Syariah dengan 304 kantor cabang serta 17 Unit Usaha Syariah dengan 154 kantor cabang. Jumlah ini terus meningkat pada Desember 2009 menjadi 31 bank syariah beserta 998 kantor cabang dengan rincian 6 Bank Umum Syariah dengan 711 kantor cabang dan 25 Unit Usaha Syariah dengan 287 kantor cabang.



Grafik 1.1. Jumlah Perbankan Syariah per Desember 2005-2009

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2009 diolah



Grafik 1.2 Jumlah Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2005.12 – 2009.12

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia 2009 diolah

Perkembangan organik bank syariah yang terus meningkat ternyata juga diikuti oleh perkembangan kinerja bank syariah. Tabel 1.1. memperlihatkan beberapa indikator seperti total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), total Pembiayaan, Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Rasio Pembiayaan Bermasalah terhadap total Pembiayaan atau *Non Performing Financing* (NPF) dari sejak 2005 – 2009 mengalami perkembangan yang berarti.

Tabel 1.1. Indikator Keuangan Bank Syariah 2005.12-2009.12

| indikator | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| DPK | 15,584 | 20,672 | 28,012 | 36,852 | 52,271 |
| Pembiayaan | 15,270 | 20,445 | 27,944 | 38,199 | 46,886 |
| FDR | 97.75% | 98.90% | 99.76% | 103.65% | 89.70% |
| NPF | 2.82% | 4.75% | 4.05% | 4.12% | 4.01% |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2009 diolah

Dari tabel diatas, perkembangan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang cepat, dari 15.584 milyar rupiah pada Desember 2005 menjadi 52.721 milyar rupiah pada Desember 2009. Pertumbuhan ini diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan yang terus meningkat dari 15,270 milyar rupiah pada Desember 2005 menjadi 46,886 milyar rupiah pada Desember 2009. Besarnya pembiayaan bank syariah ini mencerminkan tingkat keberpihakannya pada perekonomian, yang tercermin pada rasio FDR yang masih relatif lebih tinggi daripada *loan to deposit ratio* (LDR) bank konvensional. FDR bank syariah yakni 97,75% pada Desember 2005, 98,90% pada Desember 2006, 99,76 % pada

Desember 2007 terus meningkat menjadi 103,65% pada Desember 2008. Meski demikian, sampai Desember 2009 mengalami penurunan menjadi 89,70%. Rasio pembiayaan bermasalah NPF masih kecil yakni 4,01 % pada Desember 2009.

Tingginya FDR perbankan syariah menunjukkan kontribusi yang tinggi dalam menggerakkan sektor riil. Dimana, sektor usaha dengan skala kecil dan menengah (UKM) merupakan penyumbang kontribusi yang tinggi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM pada pembentukan PDB Indonesia tahun 2007 sebesar 53,6 persen atau senilai Rp 2.121,3 triliun. Tabel 1.2. memperlihatkan kontribusi UKM pada pembentukan PDB sangat tinggi terutama di beberapa sektor ekonomi. Diantaranya, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 95,75 %, perdagangan hotel dan restoran sebesar 96,45 % dan sektor bangunan sebesar 66,06%.

**Tabel 1.2 Struktur PDB Usaha Kecil, Menengah dan Besar
2006-2007 (persen)**

| No | Lapangan Usaha | Rata-rata 2006-2007 | | | |
|----|--|---------------------|----------|-------|-------|
| | | Kecil | Menengah | UKM | Besar |
| 1 | Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 86.9 | 8.85 | 95.75 | 4.25 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8.15 | 3.26 | 11.41 | 88.59 |
| 3 | Industri Pengolahan | 12.55 | 11.35 | 23.9 | 76.1 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 0.53 | 7.58 | 8.11 | 91.89 |
| 5 | Bangunan | 44.94 | 21.12 | 66.06 | 33.94 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 74.19 | 22.26 | 96.45 | 3.55 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 27.93 | 25.03 | 52.96 | 47.04 |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 16.56 | 47.16 | 63.72 | 36.28 |
| 9 | Jasa-jasa | 39.24 | 7.94 | 47.18 | 52.82 |
| | PDB | 37.67 | 15.88 | 53.55 | 46.45 |
| | PDB Tanpa Migas | 42.25 | 17.7 | 59.95 | 40.05 |

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2008 diolah

Tingginya kontribusi UKM pada pembentukan PDB, juga diikuti oleh tingginya penyerapan tenaga kerja sektor UKM. Menurut BPS, pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja sektor UKM mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 94,3 juta pekerja. Tenaga kerja tersebut tersebar pada 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta unit usaha.

Tabel 1.3. Komposisi Unit Usaha dan Tenaga Kerja

UKM dan Usaha Besar 2006-2007

| Uraian | 2006 | | 2007 | |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | UKM | UB | UKM | UB |
| Unit Usaha (unit) | 48,779,151 | 4,398 | 48,840,489 | 4,527 |
| Tenaga Kerja (orang) | 89,547,762 | 2,445,595 | 91,752,318 | 2,520,707 |

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2008, diolah

Besarnya kontribusi UKM pada PDB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, membuat perbankan harus memberikan perhatian lebih, khususnya perbankan syariah. Perbankan Syariah dituntut memberikan kontribusi pembiayaan yang tinggi pada sektor UKM. Dengan melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat dan keberpihakan perbankan syariah pada sektor riil khususnya usaha kecil dan menengah, maka sangat perlu dibuat suatu penelitian mengenai faktor apakah yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah pada sektor UKM. Lebih khususnya, penelitian mengenai pengaruh variabel ekonomi makro yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan

perbankan, dalam hal ini diwakili oleh tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau BI Rate dan tingkat inflasi terhadap pembiayaan perbankan syariah pada UKM.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah BI rate dan Inflasi mempengaruhi pembiayaan Bank Syariah bagi sektor Usaha Kecil dan Menengah
2. Bagaimana dampak *shock* variabel ekonomi dalam hal ini BI Rate dan inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah pada Usaha Kecil dan Menengah ?
3. Bagaimana *variance decomposition* variabel ekonomi dalam hal ini BI Rate dan inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah pada Usaha Kecil dan Menengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji secara empiris hubungan antara BI Rate, Inflasi dan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengestimasi dampak *shock* BI Rate dan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah pada Usaha Kecil dan Menengah.
3. Untuk mengestimasi *variance decomposition* BI Rate dan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah pada Usaha Kecil dan Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian diharapkan menambah khazanah keilmuan tentang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Dalam hal ini terkait penyaluran dana atau pembiayaan kepada sektor usaha kecil dan menengah, sekaligus memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar lebih berminat meneliti ekonomi syariah
2. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pihak terkait baik regulator (pemerintah dan Bank Indonesia) maupun praktisi perbankan syariah, terutama pada saat membuat kebijakan mengenai pembiayaan kepada sektor UKM dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syariah tercapai.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan, bahan informasi serta bahan perbandingan bagi peneliti / mahasiswa lain.

1.5 Sistematika Skripsi

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini akan dibahas secara berurutan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi landasan teori atau konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dikemukakan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta hipotesis dan metode analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan metode penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan data serta pembahasan atas temuan-temuan yang diperoleh.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan saran yang diajukan berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dan rekomendasi kebijakan.